



► PILKADA 2024

Panwaslu Ingatkan Netralitas ASN & TNI/Polri

JETIS—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kemantren Jetis, Kota Jogja, mengingatkan aparat sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri di wilayahnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pelanggaran netralitas bisa terjadi dalam berbagai kegiatan masyarakat dan media sosial.

Ketua Panwaslu Jetis, Bertinus Sijabat, menjelaskan ASN harus netral karena merupakan aparat negara yang mendapat gaji dari APBD atau APBN, sekaligus pelaksana program dan kebijakan pemerintah. "Anggota ASN tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai. Bahkan, menjadi anggota ormas yang berafiliasi dengan parpol juga tidak boleh. ASN juga tak boleh menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu," ujarnya dalam *Sosialisasi Netralitas ASN, TNI dan Polri* yang digelar Panwaslu Jetis di IOT Yogyakarta Hotel, Rabu (18/9).

Ia menegaskan, Panwaslu Jetis selalu memantau semua kegiatan paslon selama masa menjelang pemungutan suara. Dalam pemantauan, petugas mengamati, menganalisis dan memberi penilaian ada atau tidaknya pelanggaran.

Selain itu, panwaslu juga mengambil langkah preventif dengan mengirimkan surat imbauan ke paslon agar jangan sampai terjadi pelanggaran. "Kemarin saat ada kegiatan *Bumijo Berselawat* kami juga mengirim surat imbauan agar jangan sampai ada pelanggaran," katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jogja, Nindyo Dewanto, menuturkan Pemkot Jogja sudah mengharuskan surat edaran tentang netralitas ASN yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024. Di dalamnya tercantum aturan netralitas ASN dalam bermedia sosial. "Yang paling bahaya yakni mengunggah, membagikan *like*, bergabung atau *follow* akun milik paslon. Saya *follow* semua akun paslon untuk memantau. Kesbangpol punya *surveyor*. Satu dapil satu *surveyor*. Tugasnya memantau di dapil ada apa. Untuk melihatnya kami harus *follow* apa saja yang dilakukan," katanya.

Nindyo juga mengingatkan ASN agar berhati-hati dalam menghadiri kegiatan masyarakat yang berpotensi dihadiri salah satu paslon. "Misalnya Kepala Dinas Sosial diundang dalam kegiatan sosial sesuai tupoksinya, maka saya sarankan enggak usah datang," ujarnya. (Luqas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005